

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 232/HK.01.01/K.JT-17/09/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
DI BAWASLU KABUPATEN PATI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan Perubahan Kedua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang masih berjalan pada tahapan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Se- Jawa Tengah masa Jabatan 2023-2028;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2340.1/KP.01.01/SJ/07/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan nomor: 190/HK.01.01/K.JT-17/08/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 4 September 2023


KETUA,

Supriyanto., S.H., M.H.

Lampiran 1 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pati
 Nomor : 232/HK.01.01/K.JT-17/09/2023
 Tanggal : 4 September 2023
 Tentang : Perubahan Kedua Tim Fasilitasi Pengawasan
 Tahapan Pencalonan Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
 Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
 Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Pati

SUSUNAN
PERUBAHAN KEDUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN/KOTA DI BAWASLU KABUPATEN PATI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Supriyanto S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah (Koordinator)
2.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., MM.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
3.	Moh. Priyo Manfaat S.H.I., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
4.	Sigit Pamungkas, A.md.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
5.	Zaenal Abidin, S.E.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
II Penanggung Jawab			
1.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., MM.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
6.	RM. Ahmada Mangkunegara ,S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Sekretaris Pengarah
IV Ketua			
7.	RM. Ahmada Mangkunegara ,S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Ketua (Ex Officio)
V. Sekretaris			
8.	Senfamillio Reza Fahlevi, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Sekretaris
VI. Anggota			
9.	Aris Supriyanto, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
10.	Dwi Oktaviandri, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
11.	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
12.	M. Abu Aksan, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
13.	Dani Wardyanto, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
14.	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
15.	Agus Ekhsan, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota

Ditetapkan di Pati
 Pada tanggal 4 September 2023

KETUA,

Supriyanto., S.H., M.H.

SURAT TUGAS

NOMOR: 233/PM.00.02/K.JT-17/09/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 232/HK.01.01/K.JT-17/09/2023 Tentang Perubahan Kedua Tim Fasilitasi

Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Pati

MENUGASKAN:

- Kepada : (Terlampir)
Untuk : 1. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pendaftaran, Verifikasi dan
Penetapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pati pada Pemilu Tahun 2024;
2. Membuat laporan hasil Pengawasan dan dilaporkan kepada Ketua
Bawaslu Kabupaten Pati dan/atau Koordinator Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pati;
3. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Pati
Pada Tanggal : 4 September 2023


KETUA,
Supriyanto., S.H., M.H.

Lampiran I Surat Tugas
Nomor :233/PM.00.02/K.JT-17/09/2023
Tanggal : 4 September 2023

SUSUNAN
PERUBAHAN KEDUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA DI BAWASLU KABUPATEN PATI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Supriyanto S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah (Koordinator)
2.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., MM.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
3.	Moh. Priyo Manfaat S.H.I., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
4.	Sigit Pamungkas, A.md.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
5.	Zaenal Abidin, S.E.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
II Penanggung Jawab			
1.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., MM.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
6.	RM. Ahmada Mangkunegara ,S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Sekretaris Pengarah
IV Ketua			
7.	RM. Ahmada Mangkunegara ,S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Ketua (Ex Officio)
V. Sekretaris			
8.	Senfamillio Reza Fahlevi, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Sekretaris
VI. Anggota			
9.	Aris Supriyanto, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
10.	Dwi Oktaviandri, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
11.	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
12.	M. Abu Aksan, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
13.	Dani Wardyanto, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
14.	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
15.	Agus Ekhsan, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 4 September 2023


KETUA,
Supriyanto, S.H., M.H.